

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran-pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 (satu) periode anggaran tertentu. Dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Bentuk APBD terbaru terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (kategori baru). Pos pembiayaan merupakan usaha agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dan pembiayaan daerah. Pembiayaan seperti yang telah disebutkan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksud untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja modal Kota Bekasi pada tahun anggaran 2013-2017 rinciannya sebagai berikut. Tahun 2013 anggaran APBD yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp 1.097.025.307.298. Tahun 2014 anggarannya sebesar Rp 1.122.626.485.409. Tahun 2015 anggarannya sebesar Rp 1.669.431.213.113. Tahun 2016 anggarannya sebesar Rp 1.744.469.181.029. dan tahun 2017 anggaran sebesar Rp 1.583.432.179. dengan

rincian dana APBD yang telah diuraikan sebelumnya maka adapun jumlah persentase dari dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan belanja modal Kota Bekasi yaitu sebesar 25%.

Selain itu pos pembiayaan juga merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran dimana baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan dicatat dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berbagai macam prosedur didalamnya. Laporan keuangan pemerintah daerah biasa disebut juga dengan laporan keuangan sektor publik.

Pada laporan keuangan sektor publik berdasarkan Peratran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa suatu laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah belanja daerah, yang dapat didefinisikan yaitu semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah tersebut.

Dalam belanja daerah yang sering terjadi masalah adalah terdapatnya fluktuasi yaitu ketidakstabilan angka, juga terjadinya ketidakmaksimalan penyerapan anggaran yang masih kurang dari target minimumnya dan menyebabkan juga belanja daerah dan penyerapan anggarannya menjadi kurang, yang akan menimbulkan beberapa masalah dalam hal kinerja belanja seperti menurunnya pertumbuhan belanja, kurangnya efisiensi, ketidakserasian antara belanja modal dengan belanja operasi dan dapat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil.

Pada entitas belanja daerah yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Abdul Halim 2018). Bentuk pengeluaran pemerintah dari belanja modal tersebut yaitu untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan data hasil observasi yang telah dianalisis oleh peneliti dalam Laporan Realisasi Belanja Kota Bekasi tahun 2013 sampai 2017 mengenai realisasi belanja modal, bahwasannya dalam lima tahun terakhir Kota Bekasi memiliki capaian persentase belanja modal yang masih dibawah target minimum yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja modal yang mampu dicapai Kota Bekasi

dalam lima tahun terakhir hanya berada pada kisaran 60-80%, adapun uraiannya adalah sebagai berikut .

Dalam Tabel 1.1 dapat diketahui untuk realisasi belanja modal Kota Bekasi di tahun 2013 memiliki anggaran sebesar Rp 1.097.025.307.298,00 dengan realisasinya Rp 888.422.432.910,00 yang menghasilkan persentase sebesar 80,98%. Pada tahun 2014 memiliki anggaran sebesar Rp 1.122.626.485.409,00 dengan realisasinya Rp 719.478.321.954,00 yang menghasilkan presentase sebesar 64,09% mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,89%. Pada tahun 2015 memiliki anggaran sebesar Rp 1.669.431.213.113,00 dengan realisasinya Rp 1.249.954.669.378,00 menghasilkan persentase sebesar 74,87% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10,78%.

Kemudian dilanjut pada tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 1.744.469.181.029,00 dengan realisasinya Rp 1.428.034.524.406,00 menghasilkan persentase sebesar 81,86% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,0%. Dan tahun 2017 memiliki anggaran sebesar Rp 1.581.393.432.179,00 dengan realisasinya Rp 1.236.086.622.628,00 menghasilkan persentase sebesar 78,16% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,7%. Adapun lebih lanjut rincian realisasi belanja modal Kota Bekasi selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Belanja Modal Kota Bekasi**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realiasi</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Target Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2013	Rp1.097.025.307.298,00	Rp888.422.432.910,00	80,98 %	95%	Tidak Sesuai Target
2014	Rp1.122.626.485.409,00	Rp719.478.321.954,00	64,09 %	95%	Tidak Sesuai Target
2015	Rp1.669.431.213.113,00	Rp1.249.954.669.378,00	74,87 %	95%	Tidak Sesuai Target
2016	Rp1.744.469.181.029,00	Rp1.428.034.524.406,00	81,86 %	95%	Tidak Sesuai Target
2017	Rp1.581.393.432.179,00	Rp1.236.086.622.628,00	78,16 %	95%	Tidak Sesuai Target

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

(data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data realisasi belanja modal yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja modal Kota Bekasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun realisasinya cenderung mengalami kenaikan dan penurunan persentase yang tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase belanja modal setiap tahunnya yang mengalami fluktuasi. Kemudian angka persentase yang diperoleh hanya berkisar 60-80% saja, sedangkan target minimum yang telah ditentukan adalah sebesar 95%.

Dengan target minimum capaian belanja modal yang telah ditentukan sebesar 95% maka jelas realisasi belanja modal Kota Bekasi belum bisa mencapai target yang telah ditentukan tersebut. Hal tersebut juga akan memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Karena pada dasarnya belanja modal yang dilakukan oleh

pemerintah daerah selain pembangunan juga mengadakan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi maupun pembelian aset akan membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno 2017). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diketahui bahwasannya total presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut. Tahun 2013 memiliki total persentase sebesar 6,04%. Tahun 2014 memiliki total persentase sebesar 5,61% mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,43%. Tahun 2015 memiliki total persentase sebesar 5,57% yang mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%. Tahun 2016 persentase PDRB Kota Bekasi mengalami peningkatan sebesar 0,51% sehingga persentasenya menjadi 6,08%. Dan tahun 2017 total persentasenya 5,73 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,35%.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi bahwa kontribusi terbesar terhadap perekonomian di wilayah Kota Bekasi disumbangkan oleh kategori C yaitu Industri Pengolahan. Kontribusinya diatas 30% terhadap total PDRB Kota Bekasi sejak tahun 2011 hingga 2016. Kategori lainnya yang memiliki sumbangan terhadap PDRB Kota Bekasi tahun 2014-2017 adalah kategori F yaitu Perdagangan Besar dan Eceran.

Kemudian untuk kategori G yaitu Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Akan tetapi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013 hingga 2017 ketiga kategori tersebut menghasilkan kontribusi yang tidak stabil. Adapun perolehan angka dalam setiap kategori dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.



**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2013 -2017**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.94	(1.64)	(0.33)	1.26	0.39
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	3.46	3.60	3.23	4.24	4.76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.44	7.15	(9.03)	2.56	(22.19)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.91	5.32	4.97	6.39	7.38
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran	17.18	13.93	10.26	9.53	10.39
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.39	3.22	4.87	5.72	5.47
H	Transportasi dan Pergudangan	4.13	7.39	8.78	4.24	6.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.57	8.70	8.24	11.68	8.98
J	Informasi dan Komunikasi	8.98	17.19	17.92	14.55	10.99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.93	2.98	7.44	11.52	5.28
L	Real Estate	6.65	5.79	7.13	6.62	6.89
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi	8.58	8.83	7.17	8.67	8.49
O	Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.92	0.59	1.92	1.98	1.11
P	Jasa Pendidikan	9.21	13.01	10.21	7.63	8.87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.27	8.87	10.81	9.97	9.98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5.05	7.39	8.21	8.06	8.61
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6.04</b>	<b>5.61</b>	<b>5.57</b>	<b>6.08</b>	<b>5.73</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi (data diolah oleh peneliti)

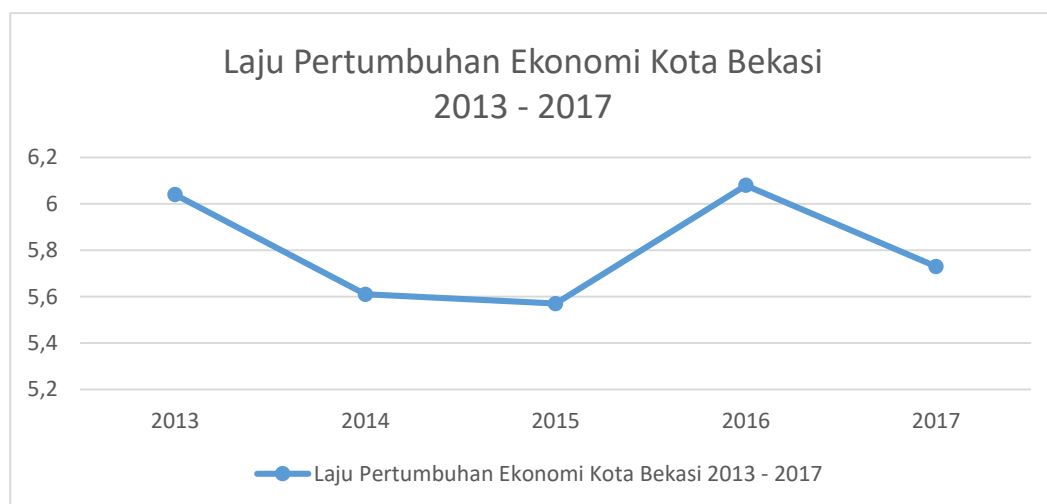
Kategori C yaitu Industri Pengolahan selalu mengalami ketidakstabilan angka hampir disetiap tahunnya hal ini dikarenakan pada industri pengolahan cenderung mengalami ketidakstabilan harga. Untuk kategori F yaitu Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran kontribusinya selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun disebabkan oleh makin banyaknya bermunculan toko eceran.



Bermunculannya toko eceran independent yang menjadi pesaing dan masih memiliki strategi logistik pasar yang cenderung berdasarkan pertimbangan biaya. Dan kategori G yaitu Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami ketidakstabilan kontribusi dan yang terendah di tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat diketahui ketiga kategori yaitu C, F, dan G sebagai kategori penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi

Berdasarkan angka yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi selama lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami angka yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan dari setiap tahunnya. Hal ini akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013 hingga 2017 yang mengalami ketidakstabilan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Kota Bekasi memiliki angka persentase Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) yang belum stabil sehingga menghasilkan capaian yang belum optimal. Dan apabila persentase tersebut dibuat menjadi grafik laju pertumbuhan ekonomi akan terlihat seperti pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

**Gambar 1.1****Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2013 – 2017 dalam persen (%)**

Sumber : BPS Kota Bekasi (<https://bekasikota.bps.go.id/>)

(data diolah oleh peneliti)

Dengan fenomena kurangnya capaian realisasi belanja modal yang rata-rata persentasenya hanya menyentuh angka 60-80% yang seharusnya mencapai 95% dan laju pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dikarenakan terjadinya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan bertambahnya angkatan kerja yang menganggur (pengangguran). Maka sudah seharusnya pemerintah Kota Bekasi memaksimalkan segala potensi untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan lebih mengoptimalkan belanja modal yang diharapkan dapat membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun peningkatan dalam bidang aset sebagai penambah fasilitas publik.

Untuk itu pemerintah Kota Bekasi harus dapat menciptakan belanja modal yang berkualitas, salah satunya dengan memaksimalkan realisasi capaian agar tidak berada dibawah angka target capaian minumannya. Selain itu, berupaya secara konsisten untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mencapai target maupun tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2013 – 2017.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh tepat mutu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh tepat jumlah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017 ?
3. Seberapa besar pengaruh tepat waktu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017 ?
4. Seberapa besar pengaruh tepat sasaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017 ?

5. Seberapa besar pengaruh tepat harga terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja tanah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja peralatan dan mesin terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2017
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal gedung dan bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2017
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2017
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja aset tetap lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2017

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan penelitian, yaitu :

a. Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bukti empiris dari penelitian serupa sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.
2. Sebagai bahan untuk melakukan kajian dan diskusi mengenai belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan persepsi di lingkungan pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengayaan literatur terkait dengan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, membuka wawasan penulis mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh belanja modal.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah Koa Bekasi sebagai bahan evaluasi kegiatan terkait belanja modal di masa yang akan datang.

3. Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai wacana atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan variabel yang sama atau dengan variabel lainnya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Setelah berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hanya digolongkan menjadi dua yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai (berisi gaji dan tunjangan pejabat dan pegawai negeri sipil), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Kemudian belanja lainnya seperti belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung diklasifikasikan menjadi belanja pegawai (berisi honorarium dan uang lembur), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Erlina, 2015:155). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis telah melakukan analisis pada Laporan Realisasi Belanja Modal Kota Bekasi tahun 2013 sampai 2017 telah ditemukan bahwa capaian realisasi belanja modal Kota Bekasi mulai dari tahun 2013 sampai 2017 masih dibawah dari target capaian yaitu hanya mencapai angka kisaran 60-80% saja.

Hal tersebut menggambarkan bahwa angka capaian persentase realisasi belum mencapai target capaian minimumnya sebagaimana telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 258 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Adapun dalam peraturan Permendagri Nomor 258 Tahun 2015 menyatakan bahwa persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen). Hal ini telah jelas bahwasannya persentase realisasi capaian belanja modal Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 masih dibawah target capaian minimum.

Kemudian mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selama lima tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2013 sampai 2017 yang telah dianalisis oleh penulis dan berdasarkan hasil wawancara awal berkaitan dengan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi Aatas Dasar Harga Konstan memiliki laju pertumbuhan yang masih cenderung tidak stabil dari tahun ke tahunnya yang mengakibatkan belum optimal.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017. Adapun yang dimaksud belanja modal yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Lebih lanjut, Halim (2014) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ukuran keberhasilan dari kegiatan belanja modal adalah lima tepat yaitu :

1. Tepat mutu
2. Tepat jumlah
3. Tepat waktu
4. Tepat sasaran
5. Tepat harga

Adapun penjelasan dari lima tepat di atas adalah sebagai berikut :

1. Tepat mutu (kualitas) dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Sedangkan menurut Badan Standar Nasional (BSN) mengartikan mutu sebagai derajat yang dicapai oleh karakteristik yang intern dalam memenuhi persyaratan.
2. Tepat jumlah dalam pengertian jumlah yang diberikan tidak berlebihan dan tidak berkekurangan atau dalam kata lain cukup.
3. Tepat waktu

Belanja modal yang tepat waktu berkaitan dengan perumusan APBD. Jika rancangan APBD cepat diselesaikan dan diserahkan kepada Kemendagri maka kesempatan pemerintah daerah untuk belanja modal akan tepat waktu, karena tidak terhalang oleh penundaan pencairan dan pusat.

4. Tepat sasaran

Belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah harus sepenuhnya diperuntukan untuk kepentingan publik dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

5. Tepat harga

Tepat harga yaitu pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Harga yang wajar artinya harga tersebut berpatokan pada Standar Biaya Umum (SBU)

Dapat diartikan bahawasannya kegiatan belanja modal dalam suatu pemerintahan maupun wilayah tertentu dikatakan akan mencapai keberhasilan apabila memenuhi dari kelima unsur di atas yang terdiri dari lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga.



Definisi belanja modal lainnya disampaikan oleh Erlina (2015) yang mengartikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Sedangkan dalam hal pertumbuhan ekonomi Sukirno (2017) dapat mendefinisikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beberapa komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting sebagaimana telah disampaikan oleh Todaro (2016) adalah sebagai berikut :

1. Akumulasi modal

Mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.

2. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (*labor force*)

3. Kemajuan teknologi yaitu cara-cara baru menyelesaikan tugas

Adapun penjelasan dari tiga komponen diatas adalah sebagai berikut.

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa depan. Pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baru meningkatkan persediaan modal (*capital stock*) fisik suatu negara (total nilai riil neto semua barang modal fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat output yang akan dicapai. Investasi langsung yang produktif ini dilakukan dengan berinvestasi dalam apa yang dikenal sebagai infrastruktur ekonomi (*economic infrastructure*) dan sosial-jalan raya, listrik,

air bersih dan sanitasi, komunikasi dan yang sejenis- yang memfasilitasi dan mengintegrasikan berbagai kegiatan perekonomian.

Investasi dalam sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitasnya, sehingga memiliki dampak yang sama atau lebih besar terhadap produksi seperti halnya peningkatan jumlah manusia. Program-program pendidikan formal, vokasional, pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) dan pendidikan orang dewasa, serta berbagai jenis pendidikan non formal dapat dilakukan secara lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia sebagai hasil dari investasi langsung dalam bangunan, peralatan, dan bahan (misalnya buku, proyektor film, komputer pribadi, peralatan sains, sarana pendidikan kejuruan, dan mesin seperti mesin bubut dan gerinda).

## 2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

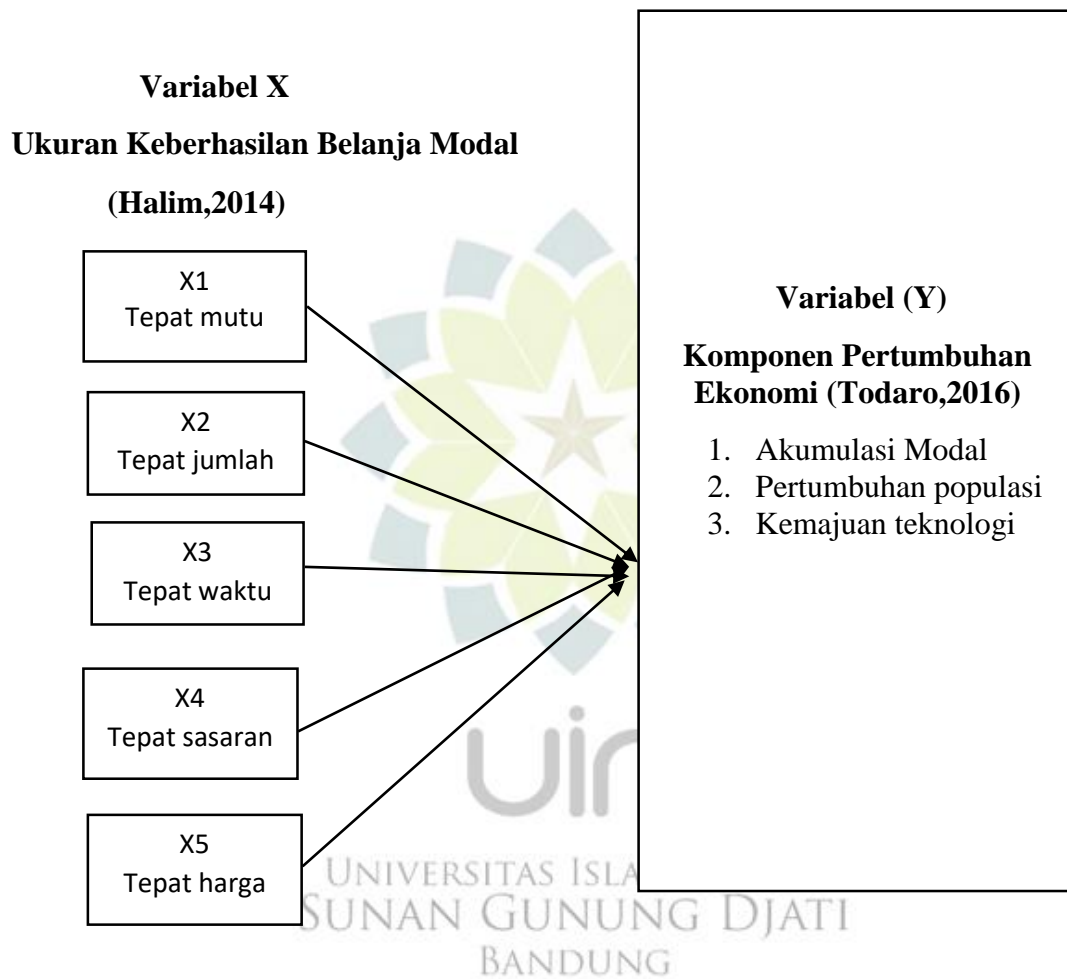
Pertumbuhan penduduk, dan akibatnya pada kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*), selama ini dipandang sebagai faktor positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti pekerja produktif yang lebih banyak, dan dengan jumlah penduduk yang besar secara menyeluruh akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri.

## 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi (*technological progress*) yang bagi banyak ekonom merupakan komponen yang paling penting. Kemajuan teknologi dalam bentuknya yang paling sederhana merupakan hasil dari peningkatan cara melaksanakan tugas-tugas tradisional seperti menanam tumbuhan, membuat pakaian, dan membangun rumah.

Pada dasarnya belanja modal berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hal ini dinyatakan oleh Jhingan (2012) yaitu pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional, dan pendapatan nasional. Jelas bahwasannya pembentukan modal merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Teori**



## 1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara tepat mutu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017  
 H<sub>1</sub> : Ada pengaruh signifikan antara tepat mutu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013–2017
- 2 Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara tepat jumlah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 - 2017  
 H<sub>1</sub> : Ada pengaruh signifikan antara tepat jumlah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017
- 3 Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara tepat waktu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017

- $H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara tepat waktu terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 – 2017
- 4  $H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara tepat sasaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017
- $H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara tepat sasaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017
- 5  $H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara tepat harga terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017
- $H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara tepat harga terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013-2017

